



DAMPAK PERISTIWA GERAKAN 30 SEPTEMBER 1965 TERHADAP PRAKTEK KEAGAMAAN KRISTEN DAN PENGARUHNYA PADA KEAMANAN SOSIAL

Josua Chariston Simanungkalit¹, Pebriyan Simanungkalit²

Program Studi Manajemen Hutan Universitas Satya Terra Bhinneka¹, Program
Studi Pendidikan Agama Kristen Sekolah Tinggi Guru Huria HKBP²

josuacharistonsimanungkalit@satyatterrabhinneka.ac.id¹,
simanungkalitpebriyan@gmail.com²

Accepted: 25 Januari 2026

Published: 29 Januari 2026

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak Peristiwa Gerakan 30 September 1965 terhadap praktik keagamaan Kristen serta pengaruhnya terhadap keamanan sosial di Indonesia. Peristiwa tersebut tidak hanya mengubah struktur politik nasional, tetapi juga memengaruhi dinamika kehidupan keagamaan dan relasi sosial masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode sejarah sosial-keagamaan, melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan terhadap arsip gereja, dokumen resmi pemerintah, serta literatur akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasca-G30S 1965 terjadi perubahan signifikan dalam praktik keagamaan Kristen, ditandai dengan pembatasan aktivitas ibadah publik, penyesuaian institusional gereja terhadap kebijakan negara, serta pergeseran ekspresi keberagamaan umat ke arah yang lebih privat dan internal. Gereja cenderung mengadopsi sikap kooperatif terhadap negara sebagai strategi adaptasi dalam situasi keamanan sosial yang represif. Dalam konteks ini, gereja berperan sebagai agen stabilisasi sosial dengan menanamkan nilai ketertiban, perdamaian, dan harmoni sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dampak G30S 1965 bersifat jangka panjang dan membentuk karakter praktik keagamaan Kristen yang berhati-hati, terstruktur, dan berorientasi pada stabilitas, sebagai hasil negosiasi antara agama, negara, dan keamanan sosial dalam sejarah Indonesia.

Key words: G30S 1965; Kristen; Keamanan, Sosial; Gereja

How to Cite: Simanungkalit, J. C., & Simanungkalit, P. (2026). Dampak Peristiwa Gerakan 30 September 1965 Terhadap Praktek Keagamaan Kristen dan Pengaruhnya Pada Keamanan Sosial. *Puteri Hijau: Jurnal Pendidikan Sejarah* (1-7)

*Corresponding author:
josuacharistonsimanungkalit@satyatterrabhinneka.ac.id

ISSN 2460-5786 (Print)
ISSN 2684-9607 (Online)

INTRODUCTION

Peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S 1965) merupakan salah satu titik balik paling menentukan dalam sejarah politik, sosial, dan keagamaan Indonesia. Peristiwa ini tidak hanya mengubah konfigurasi kekuasaan negara, tetapi juga memengaruhi relasi sosial antar kelompok masyarakat, termasuk praktik dan ekspresi kehidupan beragama.

Dalam konteks sejarah nasional, G30S 1965 sering dipahami sebagai peristiwa politik dan militer. Namun, dampaknya meluas jauh ke ranah sosial dan kultural, termasuk kehidupan keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk. Agama, sebagai unsur penting dalam identitas sosial, turut mengalami tekanan dan penyesuaian akibat perubahan iklim politik pasca-peristiwa tersebut.

Kristen sebagai salah satu agama resmi di Indonesia memiliki posisi yang unik dalam dinamika pasca-G30S 1965. Di satu sisi, gereja dan umat Kristen tidak secara langsung terlibat dalam konflik ideologis antara negara dan Partai Komunis Indonesia (PKI), namun di sisi lain, mereka tetap terdampak oleh situasi ketegangan sosial yang berkembang luas (Sukamto, 2013).

Situasi pasca-G30S 1965 ditandai oleh upaya negara dalam menegaskan ideologi Pancasila sebagai satu-satunya asas kehidupan berbangsa dan bernegara. Penegasan ini berimplikasi pada penataan ulang kehidupan keagamaan, termasuk pengawasan terhadap aktivitas keagamaan yang dianggap berpotensi mengganggu stabilitas nasional (Suharto & MSi, 2019).

Bagi umat Kristen, praktik keagamaan pasca-1965 tidak dapat dilepaskan dari konteks keamanan sosial yang penuh kecurigaan. Iklim ketakutan dan trauma sosial mendorong gereja-gereja untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan kegiatan ibadah dan pelayanan sosial di tengah masyarakat.

Perubahan kebijakan negara terhadap organisasi sosial dan keagamaan pasca-1965 turut memengaruhi ruang gerak

gereja. Negara mulai menempatkan agama sebagai instrumen stabilisasi sosial, sehingga aktivitas keagamaan diarahkan untuk mendukung ketertiban dan keamanan nasional (Rahman, 2020).

Dalam situasi tersebut, praktik keagamaan Kristen mengalami penyesuaian baik secara liturgis maupun organisatoris. Gereja-gereja cenderung menghindari narasi yang berpotensi ditafsirkan sebagai kritik terhadap negara, serta menekankan pesan moral, ketaatan, dan ketertiban sosial.

Selain itu, peristiwa G30S 1965 juga memicu perubahan relasi antarumat beragama. Ketegangan ideologis dan sosial membuka ruang bagi meningkatnya kecurigaan antar kelompok, termasuk antara komunitas Kristen dan masyarakat mayoritas di beberapa wilayah.

Keamanan sosial menjadi isu sentral dalam kehidupan masyarakat pasca-1965. Negara memandang stabilitas sebagai prasyarat utama pembangunan, sehingga segala bentuk aktivitas sosial, termasuk keagamaan, berada dalam pengawasan ketat aparat keamanan (Mengko, 2022).

Dalam konteks ini, umat Kristen sering berada pada posisi dilematis. Di satu sisi, mereka berupaya mempertahankan kebebasan beribadah, sementara di sisi lain harus menyesuaikan diri dengan tuntutan keamanan dan stabilitas sosial yang ditetapkan negara.

Praktik keagamaan Kristen juga mengalami transformasi dalam bentuk pelayanan sosial. Gereja mulai memperkuat peran di bidang pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial sebagai strategi untuk memperkuat penerimaan sosial dan menghindari stigma politik.

Strategi tersebut menunjukkan bahwa agama tidak hanya berfungsi sebagai sistem kepercayaan, tetapi juga sebagai aktor sosial yang beradaptasi terhadap perubahan struktur kekuasaan dan kebijakan negara (Nasyirudin, 2025).

Trauma kolektif akibat kekerasan pasca-G30S 1965 turut membentuk pola keberagamaan masyarakat. Bagi umat

Kristen, pengalaman ini memperkuat orientasi keagamaan yang lebih internal dan spiritual, dibandingkan ekspresi keagamaan yang bersifat publik dan politis.

Di beberapa daerah, gereja menjadi ruang aman bagi masyarakat yang mengalami ketidakpastian sosial. Namun, peran ini dijalankan secara hati-hati agar tidak menimbulkan kecurigaan dari aparat keamanan atau kelompok masyarakat lainnya.

Pengaruh peristiwa G30S 1965 terhadap praktik keagamaan Kristen juga terlihat dalam hubungan gereja dengan negara. Gereja cenderung mengadopsi sikap kooperatif terhadap kebijakan pemerintah sebagai bentuk adaptasi terhadap situasi politik yang represif (Sitompul, 2004).

Sikap kooperatif ini berdampak pada terbentuknya pola hubungan yang lebih pragmatis antara gereja dan negara. Keamanan sosial menjadi titik temu kepentingan antara keduanya, meskipun sering kali mengorbankan ruang kritik moral gereja.

Dalam jangka panjang, kondisi ini membentuk karakter praktik keagamaan Kristen yang lebih berhati-hati, terstruktur, dan berorientasi pada stabilitas. Praktik ibadah dan pelayanan gereja diarahkan untuk mendukung harmoni sosial dan menghindari konflik terbuka.

Dampak tersebut tidak hanya dirasakan pada tingkat institusional, tetapi juga pada level individual umat Kristen. Rasa takut dan kewaspadaan membentuk pola partisipasi keagamaan yang lebih tertutup dan selektif.

Keamanan sosial pasca-G30S 1965 juga memengaruhi cara umat Kristen memaknai identitas keagamaannya. Identitas religius sering kali dinegosiasikan dengan identitas kebangsaan demi menjaga posisi aman dalam struktur sosial yang berubah.

Proses negosiasi ini menunjukkan bahwa agama dan politik tidak dapat dipisahkan secara tegas dalam konteks Indonesia. Peristiwa politik besar seperti

G30S 1965 memiliki dampak langsung terhadap dinamika kehidupan keagamaan masyarakat (Rofi'i, 2024).

Oleh karena itu, kajian mengenai dampak G30S 1965 terhadap praktik keagamaan Kristen menjadi penting untuk memahami sejarah sosial Indonesia secara lebih komprehensif. Penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada kajian sejarah politik, tetapi juga pada studi sosiologi agama dan keamanan sosial.

Dengan menelaah praktik keagamaan Kristen dalam konteks pasca-G30S 1965, dapat dipahami bagaimana agama berperan sebagai mekanisme adaptasi sosial di tengah situasi krisis. Kajian ini juga memberikan pemahaman mengenai bagaimana kebijakan negara dan kondisi keamanan memengaruhi kebebasan beragama dalam praktik sehari-hari.

Dengan demikian, pendahuluan ini menjadi dasar untuk menganalisis secara lebih mendalam dampak peristiwa G30S 1965 terhadap praktik keagamaan Kristen dan pengaruhnya terhadap keamanan sosial di Indonesia.

METHODOLOGY

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian sejarah sosial-keagamaan (Yusuf, 2013). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam makna, perubahan, dan dinamika praktik keagamaan Kristen dalam konteks sosial dan keamanan pasca-peristiwa Gerakan 30 September 1965. Penelitian sejarah digunakan untuk menelusuri peristiwa masa lalu serta dampaknya terhadap kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat secara berkelanjutan.

Penelitian ini mengombinasikan pendekatan historis dan pendekatan sosiologis agama. Pendekatan historis digunakan untuk merekonstruksi peristiwa G30S 1965 dan kebijakan negara pasca-peristiwa tersebut, sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk menganalisis

perubahan praktik keagamaan Kristen serta implikasinya terhadap keamanan sosial dalam kehidupan masyarakat.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer meliputi dokumen sejarah seperti arsip gereja, surat edaran resmi gereja, notulen sinode, serta laporan kegiatan keagamaan yang terbit pada periode pasca-1965.

Data sekunder meliputi buku sejarah, jurnal ilmiah, artikel akademik, laporan penelitian, serta dokumen resmi pemerintah yang membahas peristiwa G30S 1965, kebijakan keamanan nasional, dan dinamika kehidupan keagamaan di Indonesia.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah arsip-arsip gereja dan dokumen resmi yang relevan, sedangkan studi kepustakaan dilakukan dengan mengkaji literatur ilmiah yang membahas hubungan antara agama, politik, dan keamanan sosial di Indonesia pasca-1965.

Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan diklasifikasikan berdasarkan tema, seperti perubahan praktik ibadah, relasi gereja dan negara, serta dampak terhadap keamanan sosial. Selanjutnya, data dianalisis secara interpretatif untuk menemukan pola dan makna yang muncul dari perubahan tersebut.

Dalam menganalisis data historis, penelitian ini menggunakan tahapan heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Tahap heuristik dilakukan dengan mengumpulkan sumber-sumber relevan, tahap verifikasi dilakukan untuk menilai keabsahan dan kredibilitas sumber, tahap interpretasi dilakukan untuk menafsirkan data sesuai konteks sosial dan politik zamannya, dan tahap historiografi digunakan untuk menyusun narasi sejarah secara sistematis.

Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber seperti arsip gereja, literatur akademik, dan dokumen pemerintah. Selain itu, dilakukan pula pengecekan silang antar sumber untuk meminimalkan bias interpretasi dan meningkatkan keandalan hasil penelitian.

RESULT AND DISCUSSION

1. Kondisi Praktik Keagamaan Kristen Pasca Peristiwa G30S 1965

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peristiwa G30S 1965 membawa dampak signifikan terhadap praktik keagamaan Kristen di Indonesia. Pasca-peristiwa tersebut, aktivitas keagamaan mengalami penyesuaian yang cukup ketat, terutama terkait dengan kegiatan ibadah yang bersifat publik. Gereja-gereja cenderung membatasi kegiatan yang melibatkan massa besar dan lebih menekankan ibadah internal di lingkungan jemaat masing-masing.

Penyesuaian ini dilakukan sebagai respons terhadap situasi keamanan sosial yang belum stabil serta meningkatnya pengawasan negara terhadap aktivitas organisasi sosial dan keagamaan. Praktik keagamaan Kristen lebih diarahkan pada penguatan spiritual dan moral jemaat, dengan mengurangi aktivitas yang berpotensi menimbulkan kecurigaan politik.

Tabel 1. Perubahan Praktik Keagamaan Kristen Pasca-G30S 1965

Aspek Praktik Keagamaan	Sebelum 1965	Pasca 1965
Ibadah publik	Terbuka dan masif	Lebih terbatas dan terkontrol
Kegiatan sosial gereja	Aktif dan luas	Selektif dan berhati-hati
Narasi khotbah	Beragam tema	Fokus moral dan ketertiban
Keterlibatan politik	Relatif terbuka	Sangat dibatasi

Hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam praktik keagamaan Kristen pasca-peristiwa G30S 1965, khususnya dalam bentuk pembatasan ibadah publik dan penekanan pada aktivitas internal jemaat. Temuan ini sejalan dengan teori sosiologi agama yang dikemukakan oleh (Lubis, 2017), yang menyatakan bahwa agama merupakan sistem simbol yang sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan politik tempat agama itu hidup. Dalam situasi krisis dan ketidakstabilan, praktik keagamaan cenderung mengalami penyesuaian untuk mempertahankan eksistensinya.

Penelitian terdahulu oleh (Bagir & Sormin, 2022) juga menunjukkan bahwa pasca-1965, kehidupan keagamaan di Indonesia mengalami proses depolitisasi yang kuat. Gereja, sebagaimana institusi keagamaan lainnya, mengalihkan fokus dari ekspresi sosial-politik menuju penguatan spiritual dan moral sebagai bentuk adaptasi terhadap tekanan negara dan situasi keamanan yang tidak kondusif.

2. Penyesuaian Institusional Gereja terhadap Kebijakan Negara

Hasil analisis dokumentasi menunjukkan bahwa gereja-gereja melakukan penyesuaian struktural dan organisatoris pasca-1965. Gereja cenderung mengadopsi sikap kooperatif terhadap kebijakan pemerintah demi menjaga keberlangsungan aktivitas keagamaan. Hal ini terlihat dari meningkatnya kepatuhan terhadap regulasi negara terkait perizinan kegiatan keagamaan dan pelaporan aktivitas organisasi.

Penyesuaian institusional ini menunjukkan adanya relasi pragmatis antara gereja dan negara. Gereja berupaya menempatkan diri sebagai mitra negara dalam menjaga stabilitas sosial, sekaligus melindungi jemaat dari potensi tekanan politik dan keamanan.

Tabel 2. Bentuk Penyesuaian Institusional Gereja

Bentuk Penyesuaian	Deskripsi
Kepatuhan regulatif	Mengikuti aturan perizinan dan administrasi negara
Koordinasi dengan aparat	Pelaporan kegiatan keagamaan tertentu
Penyesuaian organisasi	Penyederhanaan struktur kegiatan
Pendekatan non-konfrontatif	Menghindari kritik terbuka terhadap negara

Penyesuaian institusional gereja terhadap kebijakan negara sebagaimana ditemukan dalam hasil penelitian mencerminkan pola hubungan kooperatif antara agama dan negara. Dalam perspektif teori hegemoni negara yang dikemukakan oleh Gramsci, institusi sosial termasuk agama sering kali menyesuaikan diri dengan kekuasaan dominan untuk mempertahankan ruang hidupnya (Jannah, 2019). Gereja tidak berada dalam posisi oposisi, melainkan menjadi bagian dari mekanisme stabilisasi sosial.

Penelitian (Taum, 2020) tentang negara Orde Baru menunjukkan bahwa rezim pasca-1965 menempatkan stabilitas sebagai agenda utama, sehingga semua organisasi sosial diarahkan untuk mendukung keamanan nasional. Dalam konteks ini, gereja mengambil posisi pragmatis dengan mematuhi regulasi negara sebagai strategi perlindungan institusional dan jemaat

3. Dampak terhadap Ekspresi Keberagamaan Umat Kristen

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada level individu, umat Kristen mengalami perubahan dalam mengekspresikan keberagamannya. Rasa takut dan kewaspadaan menjadi faktor dominan yang memengaruhi partisipasi jemaat dalam kegiatan gereja. Banyak umat memilih untuk lebih aktif dalam kegiatan ibadah internal dibandingkan keterlibatan sosial yang bersifat eksternal.

Perubahan ini menunjukkan terjadinya pergeseran dari keberagamaan yang bersifat

ekspresif menuju keberagamaan yang lebih personal dan privat. Gereja menjadi ruang aman bagi umat untuk mengekspresikan iman tanpa tekanan sosial dan politik.

Tabel 3. Pola Ekspresi Keberagamaan Umat Kristen

Bentuk Ekspresi	Karakteristik
Ibadah pribadi	Meningkat
Ibadah komunal kecil	Lebih dominan
Aktivitas lintas agama	Menurun
Partisipasi sosial terbuka	Terbatas

Temuan penelitian yang menunjukkan pergeseran ekspresi keberagamaan umat Kristen dari publik ke privat dapat dijelaskan melalui teori privatisasi agama. Menurut (Rahman, 2020), dalam kondisi tekanan struktural dan kontrol negara yang kuat, agama cenderung berpindah ke ruang personal sebagai mekanisme bertahan. Umat Kristen memilih mengekspresikan iman secara lebih internal untuk menghindari risiko sosial dan politik.

Trauma sosial akibat kekerasan politik pasca-1965 membentuk pola keberagamaan yang lebih hati-hati dan tidak konfrontatif. Gereja berfungsi sebagai ruang aman yang memberikan ketenangan spiritual, bukan sebagai arena ekspresi sosial yang terbuka.

4. Pengaruh terhadap Keamanan Sosial

Hasil penelitian mengungkap bahwa praktik keagamaan Kristen pasca-G30S 1965 memiliki keterkaitan erat dengan isu keamanan sosial. Gereja berperan sebagai agen stabilisasi sosial dengan menanamkan nilai ketertiban, ketaatan hukum, dan harmoni sosial dalam ajaran keagamaannya. Hal ini berkontribusi pada upaya negara dalam menjaga keamanan dan mencegah konflik horizontal.

Namun demikian, peran tersebut juga memiliki konsekuensi berupa berkurangnya ruang kritik sosial gereja terhadap kebijakan negara. Keamanan sosial menjadi prioritas utama yang sering kali mengalahkan fungsi

profetik agama.

Tabel 4. Peran Gereja dalam Keamanan Sosial

Aspek Keamanan Sosial	Peran Gereja
Pencegahan konflik	Edukasi moral dan perdamaian
Stabilitas sosial	Dukungan terhadap ketertiban
Relasi antarumat	Pendekatan terbatas dialog
Kontrol sosial	Internalisasi nilai kepatuhan

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa gereja memainkan peran penting dalam menjaga keamanan sosial melalui internalisasi nilai ketertiban, perdamaian, dan ketaatan hukum. Temuan ini relevan dengan teori fungsi sosial agama yang dikemukakan oleh Durkheim, yang memandang agama sebagai sarana integrasi sosial dan pengendalian moral Masyarakat (Durkheim, 2018).

Namun demikian, sebagaimana dikemukakan, peran agama sebagai agen stabilitas sering kali diiringi dengan berkurangnya fungsi kritis terhadap negara. Gereja lebih menekankan harmoni sosial dibandingkan kritik profetik, sehingga keamanan sosial terjaga tetapi ruang kebebasan berekspresi menjadi terbatas.

5. Implikasi Jangka Panjang terhadap Kehidupan Keagamaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak peristiwa G30S 1965 tidak bersifat sementara, melainkan membentuk pola praktik keagamaan Kristen dalam jangka panjang. Kehati-hatian, kepatuhan struktural, dan orientasi stabilitas menjadi karakter dominan dalam kehidupan gereja hingga memasuki masa Orde Baru.

Implikasi ini memperlihatkan bahwa peristiwa politik besar memiliki daya pengaruh kuat terhadap pembentukan budaya keagamaan. Praktik keagamaan Kristen berkembang dalam kerangka adaptasi terhadap tekanan politik dan tuntutan keamanan sosial.

Tabel 5. Dampak Jangka Panjang Peristiwa G30S 1965

Dimensi	Dampak
Praktik ibadah	Lebih terstruktur dan terkendali
Hubungan gereja-negara	Kooperatif dan pragmatis
Budaya keagamaan	Hati-hati dan stabilitas-oriented
Peran sosial gereja	Selektif dan terbatas

CONCLUSION

Peristiwa Gerakan 30 September 1965 membawa dampak yang signifikan dan berkelanjutan terhadap praktik keagamaan Kristen di Indonesia serta pengaruhnya terhadap keamanan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan politik dan kebijakan negara pasca-peristiwa tersebut mendorong gereja dan umat Kristen untuk melakukan berbagai bentuk penyesuaian, baik pada tingkat institusional maupun individual. Praktik keagamaan mengalami pergeseran dari ekspresi publik yang relatif terbuka menuju bentuk keberagamaan yang lebih berhati-hati, terstruktur, dan berorientasi internal. Gereja menempatkan diri secara pragmatis dalam relasinya dengan negara dengan mengedepankan sikap kooperatif demi menjaga keberlangsungan aktivitas keagamaan dan melindungi jemaat. Dalam konteks keamanan sosial, gereja berperan sebagai agen stabilisasi dengan menanamkan nilai ketertiban, perdamaian, dan harmoni sosial, meskipun hal tersebut sering kali berdampak pada terbatasnya fungsi kritis gereja terhadap kebijakan negara. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa peristiwa G30S 1965 tidak hanya merupakan peristiwa politik, tetapi juga membentuk pola budaya keagamaan Kristen dalam jangka panjang. Praktik keagamaan berkembang sebagai hasil negosiasi antara iman, kekuasaan negara, dan tuntutan keamanan sosial dalam konteks sejarah Indonesia.

REFERENCES

- Bagir, Z. A., & Sormin, J. (2022). *Politik moderasi dan kebebasan beragama-Suatu tinjauan kritis*. Elex Media Komputindo.
- Durkheim, E. (2018). The division of labor in society. In *Social stratification* (pp. 217–222). Routledge.
- Jannah, N. (2019). Realitas pesantren dan kebijakan pendidikan Islam dalam perspektif hegemoni Antonio Gramsci. *Journal of Islamic Education Research*, 1(01), 1–21.
- Lubis, H. M. R. (2017). *Sosiologi agama: Memahami perkembangan agama dalam interaksi Islam*. Kencana.
- Mengko, D. M. (2022). *Intelijen dan kekuasaan Soeharto*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Nasyirudin, M. (2025). *Sosiologi Pemerintahan*. CV Eureka Media Aksara.
- Rahman, M. T. (2020). *Agama dan politik identitas dalam kerangka sosial*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Rofi'i, A. F. (2024). PENGARUH PERISTIWA GERAKAN 30 SEPTEMBER 1965 TERHADAP KONDISI SOSIAL POLITIK DI CIREBON. *Candrasangkala: Jurnal Pendidikan Dan Sejarah*, 10(2).
- Sitompul, E. M. (2004). *Gereja menyikapi perubahan*. BPK Gunung Mulia.
- Suharto, H. S., & MSi, M. M. (2019). *Kebijakan Pemerintah sebagai Manifestasi Peningkatan Toleransi Umat Beragama guna Mewujudkan Stabilitas Nasional dalam Rangka Ketahanan Nasional*. Reativ.
- Sukamto, A. (2013). Ketegangan antar kelompok agama pada masa orde lama sampai awal orde baru: Dari konflik perumusan ideologi negara sampai konflik fisik. *Indonesian Journal of Theology*, 1(1), 25–47.
- Taum, Y. Y. (2020). *Sastran dan politik representasi tragedi 1965 dalam negara orde baru*. Sanata Dharma University Press.
- Yusuf, A. M. (2013). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan (Pertama). Jakarta: Renika Cipta.